

**PENGARUH POLITIK *CULTUURSTELSEL* TERHADAP PERKEMBANGAN
MASYARAKAT INDONESIA TAHUN 1830-1870**

**THE EFFECT OF *CULTUURSTELSEL* POLITICS ON INDONESIAN COMMUNITY
DEVELOPMENT IN 1830-1870**

Agus Susilo¹, Sarkowi²

Dosen Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Lubuklinggau
agussusilo594@yahoo.co.id

Abstrak: Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel oleh van den Bosch pada tahun 1830 di Indonesia dilatarbelakangi oleh kesulitan keuangan akibat perang Jawa tahun 1825-1830 dan Belanda melawan Belgia pada tahun 1830-1831 di Belanda. Akibat dari politik cultuurstelsel atau sistem tanam paksa Indonesia pada tahun 1830-1870 adalah dalam sistem tanam paksa ini, masyarakat dibebani berbagai pajak berupa hasil pertaniannya. Belanda berusaha memperbaiki keuangan negaranya dengan memeras rakyat Indonesia. Kesimpulannya, sistem tanam paksa yang telah membawa kejayaan bangsa Belanda akhirnya dihapuskan setelah melalui perjuangan Belanda sendiri di negaranya. Sistem tanam paksa akhirnya ditiadakan yang ditandai dengan masuknya dana asing atau investasi negara-negara Barat ke Indonesia untuk mengurus perekonomian bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pengaruh, Tanam Paksa, Pembangunan, Indonesia

Abstract: *The forced cultivation system or cultuurstelsel by van den Bosch in 1830 in Indonesia was motivated by financial difficulties due to the Java war in 1825-1830 and the Netherlands against Belgium in 1830-1831 in the Netherlands. The result of the politics of the cultuurstelsel or the Indonesian forced cultivation system in 1830-1870 was in this system of forced cultivation, the people were burdened with various taxes in the form of their agricultural products. The Dutch tried to improve their country's finances by extorting the Indonesian people. The conclusion, namely the forced planting system that has brought glory to the Dutch nation was finally abolished after going through the struggle of the Dutch themselves in their country. The forced cultivation system was finally abolished which was marked by the entry of foreign funds or the investment of Western nations in Indonesia to drain the economy of the Indonesian nation.*

Keywords: *Influence, Cultuurstelsel, Development, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pengaruh kolonialisme bangsa asing terutama bangsa Belanda telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 sampai abad ke-20 yang membawa banyak pengaruh dalam perubahan dan pembentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia, yang awalnya lebih ditentukan oleh kriteria pemilikan tanah pertanian dan kedudukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun stratifikasi sosial pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang terjadi dalam masyarakat Indonesia berubah berdasarkan diskriminasi rasial sehingga terbentuklah tiga lapisan sosial yang tercantum di dalam *Regerings reglement* 1854. Stratifikasi sosial ini sebagai berikut, pertama, masyarakat kelas satu yang terdiri dari bangsa Belanda, Amerika dan orang-orang Eropa sebagai kaum penjajah yang berkuasa di Indonesia. Kedua, masyarakat kelas dua atau kelas menengah yang ditempati oleh orang-orang asing, seperti orang-orang Cina, Arab, India, dan lainnya yang tinggal di Indonesia. Serta ketiga, masyarakat kelas tiga atau kelas bawah yang ditempati oleh orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia asli disebut *inlander*, sebagai lapisan terbawah dalam susunan masyarakat Hindia Belanda (Irwanto, 2007: 2).

Menjelang akhir abad XVIII, VOC mengalami kemunduran. Moralitas pegawai-pegawai VOC mulai menurun karena rendahnya kesejahteraan yang mereka terima. Praktik-praktik korupsi mulai marak dan menggerogoti pondasi kongsi dagang Hindia Belanda ini. Selain itu kas negeri Belanda juga sedang mengalami kekosongan akibat perang. Keuntungan VOC banyak tersedot untuk menutup kesulitan keuangan ini. Maka pada tanggal 31 Desember 1799, VOC yang hampir berusia dua puluh abad harus menerima akhir hidupnya. Sejak 1 Januari 1800 kekuasaan di Hindia Belanda beralih dari VOC ke pemerintah kolonial Belanda. Golongan konservatif yang menguasai pemerintahan kolonial pada masa awal abad XIX memandang politik eksploitasi dengan penyerahan paksa peninggalan VOC sangat cocok untuk mengelola Hindia Belanda sebagai daerah *wingewest* atau daerah yang menguntungkan negeri induk. Sistem penyerahan paksa itu dapat diterapkan dalam usaha eksploitasi produksi pertanian tanah jajahan yang langsung ditangani oleh pemerintah kolonial. Eksploitasi produksi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ini diwujudkan dalam bentuk perkebunan negara. Sejak itulah Hindia Belanda memasuki masa sistem tanam wajib atau tanam paksa (*cultuurstelsel*) (Kurniawan, 2014: 164).

Pada abad ke-18 kopi sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa di Eropa, permintaan kopi melonjak dengan harga yang terus naik membuat komoditas kopi menjanjikan. VOC

(*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) sebuah kantor dagang milik Belanda yang memanfaatkan peluang tersebut. VOC berkeinginan menjadi pemasok utama di pasaran Eropa. Peluang dagang yang laku di pasaran Eropa di antaranya the, tebu, dan kopi, kesemuanya tumbuh subur di pegunungan Priangan dan wilayah-wilayah pegunungan lainnya. Terbentuknya jaringan navigasi atau transportasi perdagangan di satu pihak dan di pihak lain jaringan antara industri dan daerah bahan-bahan mentah, muncullah satu sistem global ekonomi. Sistem ini mempunyai implikasi luas dan mendalam tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi erat hubungannya dengan bidang politik (Lasmiyati, 2015: 218-219).

Pada tahun 1829 Van den Bosh dikirim ke Indonesia dan membuat sebuah peraturan yang mewujudkan kepada rakyat untuk menyerahkan "*landrento*" bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk tenaga kerja tertentu untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang laku di Eropa. Selain itu, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Maka dengan cara tersebut, desa akan dapat membayar hutang pajak tanahnya dari hasil panen desa tersebut. Jika hasil penjualan panen tersebut lebih banyak dari pajak tanah yang harus dibayar, maka desa tersebut akan menerima kelebihannya. Akan tetapi jika kurang, desa tersebut masih harus membayar kekurangannya tersebut dari sumber-sumber lain. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi pajak (Wasino, 2008: 3).

Sistem tanam paksa yang diterapkan sejak tahun 1830 ini, pada dasarnya adalah suatu penghidupan kembali sistem eksploitasi dari masa VOC yang berupa penyerahan wajib, Raffles pernah menghapus sistem penyerahan wajib dan menggantinya dengan sistem pajak tanah (*land rent*), dalam rangka usaha untuk mendorong petani meningkatkan produksi tanaman ekspor. Usaha Raffles gagal karena kebijaksanaannya tidak mampu menciptakan hubungan yang efektif antara pemerintah dengan para petani yang tidak lagi menggunakan penghubung para Bupati dan kepala-kepala Desa. Sistem tanam paksa pada dasarnya merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Maka dari itu, ciri pokok sistem tanam paksa terletak pada keharusan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil tanaman pertanian mereka, dan bukan dalam bentuk uang seperti yang berlaku dalam sistem pajak (Maslahah & Hidayat, 2016: 19).

METODE

Artikel penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (Historis). Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lalu berdasarkan data yang diperoleh dengan menempih proses itu disebut *historiografi* (penulis sejarah) Gottschalk (2008: 39).

Penulisan artikel ilmiah tersebut dilakukan melalui tahapan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode historis. Peneliti menggunakan tahapan penulisan artikel ilmiah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sjamsuddin (2007: 85-155), yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, serta interpretasi dan penulisan sejarah (historiografi).

Pengumpulan sumber (Heuristik)

Pengumpulan sumber (Heuristik) dilakukan setelah peneliti menentukan topik yang akan dikaji peneliti dalam menyusun artikel ilmiah. Sumber sejarah, yaitu “tinggalan kehidupan manusia dan hasil aktivitas manusia yang dikomunikasikan”.

Kritik Sumber

Dalam metodologi sejarah kritik sumber meliputi dua tahapan, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Sedangkan kritik internal, yaitu mengacu pada kredibilitas sumber, dan bertujuan untuk memahami isi teks. (Gottschalk, 2008: 29-35).

Interpretasi

Dalam tahapan interpretasi peneliti melakukan dua hal, yaitu dengan analisis dan sintesis. Pada tahapan analisis peneliti menguraikan bahasan yang akan dikaji peneliti (Yass, 2004: 36).

Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan proses penyusunan dan penuangan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan. Peneliti berusaha menyajikan hasil penelitian dengan gaya bahasa yang menarik dan komunikatif (Gootschalk, 2008: 32).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Sistem-sistem feodal, perbudakan, pembakaran janda, peperangan-peperangan saudara, pengayauan kepala, kanibalisme, perampokan, dan praktek-praktek lain yang tidak dapat

diterima dihapuskan dibawah kekuasaan Belanda. Tentu saja bentuk-bentuk kejahatan yang baru dan lebih modern menggantikan praktek-praktek tersebut ketika pihak penjajah yang hidup dalam alam industrialisasi mulai mengeksploitasi rakyat yang dijajahnya. Akan tetapi, dalam hal-hal yang penting banyak orang Indonesia telah dipaksa memasuki zaman yang lebih modern. Rakyat Indonesia juga telah diberi musuh bersama yang potensial. Dasar-dasar telah diletakkan bagi pembentukan suatu bangsa baru yang disatukan oleh tradisi-tradisi budaya dan politik selama berabad-abad dan oleh pengalaman terakhir dari penaklukan dan pemerintah Belanda. Belanda tidak menciptakan Indonesia, tetapi mereka telah menetapkan luas wilayahnya dan menciptakan suatu lingkungan dimana kekuatan-kekuatan kaum nasionalis akhirnya dapat tumbuh dan berkembang (Ricklefs, 2007: 222-223).

Politik kolonial sejak tahun 1800 sampai kira-kira tahun 1870 terombang-ambing antara dua gagasan, sistem dagang dan sistem pajak. Kenyataan dari kondisi negeri induk pada satu pihak dan situasi negeri jajahan pada pihak lain mendorong penguasa kolonial kepada politik kolonial konservatif yang menguntungkan serta yang menurut keadaan mungkin dilaksanakan. Pada tahun 1830, keadaan baik di Indonesia maupun luar negeri Belanda, sangat memburuk. Hutang semakin besar untuk menutup biaya perang Belgia dan perang Diponegoro. Maka untuk menghindari kebangkrutan, Jawa diharapkan memberi hasil cukup untuk mengisi kekosongan kas itu. Van den Bosh akan memusatkan politik kolonial pada produksi. Disadari bahwa negeri Belanda tidak mempunyai perdagangan, perkapalan dan pabrik pada waktu itu. Hal yang diperlukan ialah menggunakan tenaga rakyat untuk penanaman hasil-hasil yang dapat dijual di pasaran dunia tidak secara bebas tetapi dengan sistem paksa, jadi bukan sistem penanaman bebas atau kolonialisasi bagi bangsa Eropa (Poesponegoro & Notosusanto, 1993: 2-7).

Pada hakikatnya seluruh sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) dilaksanakan berdasarkan paksaan di segala jenjang dari atas ke bawah. Akibat ketentuan ini para pegawai cenderung menjadi pegawai-pegawai yang buruk, karena tidak lagi menghiraukan rasa keadilan, mematikan rasa perikemanusiaan, menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat dan tidak mengindahkan lagi kepentingan penduduk demi mementingkan kepentingan sendiri. Jadi sistem tanam paksa tidak mendidik pegawai-pegawainya menjadi pengusaha-pengusaha atau pemimpin-pemimpin perusahaan yang baik. Para pegawai pemerintah kolonial tidak mau bersusah payah mengadakan persetujuan dengan para petani secara orang per orang, mereka lebih suka menetapkan target yang harus dicapai untuk masing-masing

desa secara keseluruhan. Ketentuan bahwa tanah yang diperuntukkan bagi tanam paksa dibebaskan dari pajak tanah juga tidak dilaksanakan. Demikian pula kegagalan panen dan kerusakan tanaman tetap menjadi tanggungan penduduk. *Cultuurstelsel*, karenanya, tidak lagi adalah sistem eksploitasi pemerintah dengan cara monopoli yang resikonya dibebankan rakyat (Daliman, 2012: 34-36).

Dalam menggapai tujuan-tujuan politik, mereka yang memiliki kekuasaan dapat menggunakan untuk kepentingan itu. Untuk menentukan efektivitas penggunaan kekuasaan tidak hanya tergantung jumlah sumber daya yang dimiliki penguasa, tetapi juga tergantung pada pendistribusian sumber daya antara pemegang kekuasaan dan sarana atau obyek kekuasaan. Semakin besar kelebihan sumber daya yang dimiliki penguasa atas pihak-pihak yang dikuasai, maka semakin besar pula peluang penguasa untuk memperoleh kepatuhan. Dalam hal ini, kelompok ternyata tidak mempunyai kemampuan untuk membangkitkan motivasi karena anggota-anggotanya terlanjur bersikap apatis, mereka tidak melihat arti penting tujuan-tujuan politik yang ditargetkan untuk dicapai. Mereka mempunyai ideologi, baik yang konservatif ataupun revolusioner, keyakinan yang mendalam terhadap ideologi dapat membangkitkan motivasi untuk menggunakan sumber daya yang terbatas ragam dan jumlahnya untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang diyakininya (Haryanto, 2005: 48-53).

Menurut Niel dalam (Maslahah & Hidayat, 2016: 22), Sistem tanam paksa dilaksanakan melalui saluran birokrasi pemerintah, yang melibatkan pejabat-pejabat pribumi dan Eropa. Pejabat pribumi mencakup para Bupati sampai Kepala Desa. Pejabat Eropa meliputi para Residen, Asisten Residen, Kontrolir, dan Direktur Tanaman, yang bertugas sebagai pengawas jalannya pelaksanaan sistem tanam paksa. Ini berarti sistem tanam paksa menyadari diri pada sistem tradisional dan feodal dengan perantara struktur kekuasaan lama. Secara umum pelaksanaan sistem tanam paksa telah mempengaruhi dua unsur pokok kehidupan agraris pedesaan Jawa, yaitu tanah dan tenaga kerja. Dampak dari sistem tanam paksa di Jawa selain mempengaruhi tanah pada sistem pedesaan dan munculnya tenaga buruh yang murah, masih ditambah satu hal lagi, yaitu lahirnya pembentukan modal di Desa. Perolehan laba yang sangat luar biasa bagi Belanda menunjukkan bahwa sistem tanam paksa merupakan eksploitasi Belanda, terutama di Jawa pada periode 1830-1870.

Dalam prakteknya pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia, maka uang dari negeri Indonesia mengalir ke Negeri Belanda untuk menolong negeri itu dari kehancuran ekonomi. Di samping itu, uang tersebut juga digunakan untuk membina sarana dan prasarana di Negeri

Belanda, seperti perbaikan jalan kereta api. Walaupun uang berlimpah-limbah, namun Indonesia tetap miskin dan rakyatnya sengsara. Culturstelsel semakin ditingkatkan untuk membangun negeri Belanda. Paksaan semakin ditingkatkan sehingga rakyat Indonesia semakin tertekan. Hampir semua kelebihan dari keuntungan para penanamnya dikirim ke Negeri Belanda. Dalam tahun 1832 peraturan ekspor diperketat, penjualan hasil kepada Belanda ditekan serendah mungkin atau harus ditentukan oleh Belanda. Sebaliknya, rakyat tidak boleh menjual hasil buminya kepada pedagang lain (Wiharyanto, : 5).

Pengaruh Politik Culturstelsel Terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia Tahun 1830-1870

Pemerintah kolonial Belanda yang pertama kali setelah runtuhnya VOC dipimpin oleh Dirk van Hogendorp (1799-1808). Dalam pemikiran kaum liberal kondisi rakyat yang tertinggal disebabkan oleh sistem feodal yang mematikan potensi rakyat. Sistem tanam paksa merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, van den Bosh menghendaki peningkatan campur tangan orang Eropa dalam proses produksi. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang diminta pemerintah di tanah-tanah milik mereka sendiri. Penyerahan hasil tanaman, menurut teorinya, dilakukan atas kemauan penduduk sendiri namun tentu dalam kenyataannya tidak demikian. Tuntutan kerja paksa diwajibkan bagi penanaman kopi yang hampir semuanya dilakukan di tanah yang belum digarap, meskipun pada prakteknya penanaman juga dilakukan di lahan pertanian yang sudah digarap (Kurniawan, 2014: 165).

Menurut Poeponegoro & Notosusanto, dalam (Sondarika, 2008: 61), Ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa yang tertera dalam *Stadsblad* (Lembaran Negara) tahun 1834 No. 22 beberapa tahun setelah tanam paksa mulai dijalankan di Pulau Jawa, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual dipasar Eropa.
- 2) Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima tanah pertanian yang dimiliki penduduk Desa.
- 3) Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.

- 4) Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
- 5) Tanaman dagangan yang dihasilkan ditanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditafsirkan itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
- 6) Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat.
- 7) Penduduk Desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Pada akhirnya, sistem ekonomi modern yang muncul akibat tanam paksa meskipun berhasil mendorong Jawa semakin terlibat dalam perdagangan internasional karena pertumbuhan yang mantap dibidang ekspor, namun disisi lain telah mengeksploitasi habis-habisan sistem ekonomi sibsistens yang menjadi basis ekonomi kaum petani. Eksploitasi lewat sistem tanam paksa bersifat brutal dan mengakibatkan petani Jawa menderita kemiskinan dan kelaparan. Struktur sosial dan ekonomi Jawa nyaris dihancurkan. Kemiskinan dan kelaparan menjadi masalah pokok penduduk Jawa. Pertambahan penduduk Jawa, berkurangnya lahan pertanian dan perluasan perkebunan Eropa menjadi penyebab kemiskinan di Jawa (Maslahah & Hidayat, 2016:29).

Selain pemerintah kolonial Belanda memperoleh keuntungan dari sistem tanam paksa, pengaruh sistem tanam paksa juga berdampak pada maskapai perdagangan Belanda, yaitu *Nederlandsche Handel-Maatschappij* yang berdiri sejak 1824 memperoleh keuntungan banyak dari sistem tanam paksa. Dari pemerintah *Handel-Maatschappij* ini mendapat hak untuk memonopoli pengangkutan hasil tanaman-tanaman yang laku di pasar internasional ke Negeri Belanda dan menjualnya disana. Kemajuan-kemajuan tertentu yang terlihat selama sistem tanam paksa berlangsung, misalnya perluasan jaringan jalan raya, namun hal itu bukan dimaksudkan oleh pemerintah kolonial untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Untuk tahun-tahun terakhir semakin tampak jelas bahwa sistem tanam paksa sebagai suatu sistem eksploitasi kolonial

tidak begitu efisien. Setelah masuknya modal swasta untuk mengambil bagian dalam eksploitasi sumber-sumber alam Indonesia, akhirnya dengan dihentikan sistem tanam paksa sejak tahun 1870, pemerintah Belanda harus memberikan peluang bagi modal swasta Belanda untuk memasuki Indonesia (Daliman, 2012: 44).

SIMPULAN

Sistem tanam paksa atau *Cultuurstelsel* oleh van den Bosh tahun 1830 di negeri Indonesia ini dilatar belakangi oleh kesulitan keuangan akibat perang Jawa tahun 1825-1830 dan Belanda melawan Belgia tahun 1830-1831 di negeri Belanda. Van den Bosh yang diutus Belanda di Indonesia untuk membenahi keuangan Belanda, menerapkan sistem tanam paksa dengan memanfaatkan atau mempengaruhi elit tradisional Indonesia untuk melancarkan usahanya. Untuk menutupi kas yang kosong akhirnya sistem tanam paksa berhasil diterapkan. Dimana dalam sistem tanam paksa ini, rakyat dibebani berbagai macam pajak dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Bangsa Belanda berusaha memperbaiki keuangan negerinya dengan memeras bangsa Indonesia. Rakyat diharuskan menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Bangsa kolonial Belanda membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan sangat murah dan dilarang menjual hasil bumi pada pedagang lain serta membawa dan memasarkannya ke negerinya Belanda sendiri.

Setelah melalui sistem tanam paksa yang sangat panjang, akhirnya ekonomi bangsa Belanda menjadi stabil dan sangat maju. Namun kehidupan bangsa Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, bertambah menderita. Sampai akhirnya melalui perjuangan kaum Belanda di negerinya, sistem tanam paksa yang telah memberikan kejayaan bagi bangsa Belanda, resmi dihapuskan. Berakhirnya sistem tanam paksa ini akhirnya ditandai dengan masuknya dana asing atau penanaman modal bangsa Barat di Indonesia untuk mengurus ekonomi bangsa Indonesia melalui penanaman modalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Daliman, A. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Gottschalk, Louis. 2008. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Irwanto, Dedi. 2007. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Palembang: FKIP Sejarah UNSRI.
- Kurniawan, Hendra. 2014. *Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870*. Yogyakarta: Ilmu Sosial Universitas Sanata Dharma.

- Lasmiyati. 2015. *Kopi di Priangan Abad XVIII-XIX*. Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Maslahah, Wafiyatu & Hidayat, Arif Wahyu. 2016. *Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Jawa 1830-1870*. Malang: Universitas Islam Raden Rahmat & FPISH IKIP Budi Utomo.
- Poesponegoro & Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Ombak.
- Sondarika, Wulan. 2008. *Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870*. Ciamis: FKIP Sejarah Universitas Galuh.
- Wasino. 2008. *Berjuang Menjadi Wirausaha: Sejarah Kehidupan Kapitalisme Bumi Putra Indonesia*. Semarang: Unnes Press.
- Wiharyanto, A. Kardiyanto____. *Kebijakan Ekonomi Kolonial Tahun 1830 1901*. Yogyakarta: FKIP Sejarah Universitas Sanata Dharma.
- Yass, Marzuki. 2004. *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Palembang: Proyek SP4 Universitas Sriwijaya.